

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

The Influence of Good Corporate Governance on Carbon Emission Disclosure

**Mohammad Syafik¹,
Shofi Farihatul Ulyah²,
An'im Fattach³,
Yenni Vera Fibriyanti⁴
Rochman Arif⁵.**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Lamongan

Surel Korespondensi:
mohammadsyafik@Unisla.ac.id

Abstrak

Studi ini meneliti bagaimana Komite Audit, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris memengaruhi penyebaran informasi tentang emisi karbon. Para peneliti mengamati perusahaan pertambangan di IDX di Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024. Untuk studi ini, kami menggunakan regresi data panel dan metode penelitian kuantitatif. Sebanyak 177 data dalam studi ini dikumpulkan dari kelompok orang yang dipilih dengan cermat. Menurut studi ini, Dewan Komisaris memiliki dampak besar pada penyebaran informasi tentang emisi karbon. Dewan dengan beberapa komisaris melakukan pekerjaan terbaik dalam mengawasi lingkungan. Rencana perusahaan tidak berfokus pada masalah lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon karena Dewan Direksi lebih peduli dengan menghasilkan uang cepat. Akibatnya, mereka tidak memiliki wewenang atas pengungkapan emisi karbon. Komite Audit tidak memiliki kendali atas Pengungkapan Emisi Karbon karena lebih berfokus pada memastikan laporan keuangan akurat, daripada memeriksa laporan non-keuangan. Selain itu, aturan untuk mengungkapkan emisi karbon tidak diterapkan secara konsisten di dalam perusahaan. Akibatnya, perhatian Komite Audit terhadap masalah lingkungan tidak cukup. Studi ini penting bagi perusahaan dalam menentukan siapa yang seharusnya menjadi bagian dari dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit ketika mereka menetapkan tujuan untuk mengurangi emisi karbon.

Kata kunci: "Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Pengungkapan Emisi Karbon."

Abstract

This study looks at how the Audit Committee, Board of Directors, and Board of Commissioners affect the sharing of information about carbon emissions. The researchers looked at mining companies on the IDX in Indonesia from 2022 to 2024. For this study, we used panel data regression and quantitative research methods. The 177 pieces of information in this study were collected from a carefully chosen group of people. The Board of Commissioners has a big impact on sharing information about carbon emissions, according to this study. Boards with several commissioners do the best job of

keeping an eye on the environment. The company's plans do not focus on environmental problems like carbon emissions disclosure because the Board of Directors is more concerned with making quick money. As a result, they do not have power over carbon emissions disclosure. The Audit Committee doesn't have control over Carbon Emission Disclosure because it focuses more on making sure financial reports are correct, rather than checking non-financial reports. Additionally, the rules for disclosing carbon emissions are not applied consistently within the company. As a result, the Audit Committee's attention to environmental issues is not enough. This study is important for companies in deciding who should be part of the board of commissioners, board of directors, and audit committee when they set goals to cut down on carbon emissions.

Keywords: "Good Corporate Governance, Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Carbon Emission Disclosure."

PENDAHULUAN

Emisi karbon telah memainkan peran besar dalam meningkatkan suhu global selama beberapa tahun terakhir (Syafik *et al.*, 2025). Pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan 729 juta ton karbon dioksida, yang merupakan 1,9% dari seluruh emisi karbon di dunia. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat keenam di antara negara-negara penghasil polusi karbon terbesar, menurut sebuah studi global oleh Carbon Project.

Tingkat polusi yang tinggi ini menunjukkan perjuangan Indonesia dalam mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan (Rizky & Aini, 2023). Situasi ini menyoroti pentingnya upaya untuk melacak dan berbagi informasi tentang emisi karbon secara jelas.

Menunjukkan emisi karbon adalah ide yang bagus. Berbagi informasi semacam ini menunjukkan seberapa terbuka suatu perusahaan tentang dampaknya terhadap lingkungan, khususnya seberapa banyak perusahaan tersebut membicarakan emisi gas rumah kaca (Safa'at & Arsjah, 2025). Di Indonesia, perusahaan tidak diwajibkan untuk melaporkan emisi karbon mereka; hal ini membuat banyak perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan informasi ini.

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan baru untuk mengurangi polusi. Ini termasuk menyetujui undang-undang penting di Indonesia, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (1994) tentang Perjanjian Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun (2004) tentang Protokol Kyoto untuk perjanjian yang sama, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun (2009) yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon diakui pada KTT G-20 di Bali. Pada KTT tersebut, Indonesia mempromosikan penggunaan kendaraan listrik melalui proyek yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022).

Perusahaan pertambangan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mendukung net zero emission. Dalam upaya mencapai emisi nol, PT. Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)

berjanji untuk mengurangi intensitas emisi hingga setengahnya untuk produk tembaga dan emas, serta setengahnya lagi untuk produk asam. Selain itu, penggunaan 100% Energi Terbarukan Baru (EBT) di Tambang Emas Tujuh Bukit serta transisi biodiesel dari B30 ke B35 telah berkontribusi pada penurunan emisi karbon secara signifikan (Investor.id, 2024).

"Meskipun Indonesia memiliki rencana untuk mengurangi emisi karbon, bisnis di negara ini dapat memilih untuk secara bebas membagikan berapa banyak karbon yang mereka lepaskan". Hal ini menunjukkan perbedaan antara apa yang dikatakan perusahaan tentang ramah lingkungan dan seberapa banyak mereka benar-benar melaporkan emisi karbon mereka. Jadi, memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan bisnis yang benar-benar berkomitmen sangat penting bagi negara untuk mencapai tujuannya. Salsabila dan Murdianingrum (2026) mengatakan bahwa memiliki tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk membuat keputusan etis.

Banyak orang berpikir bahwa cara perusahaan menangani manajemen dan pengambilan keputusannya memiliki pengaruh besar terhadap seberapa banyak emisi karbon yang mereka laporkan. Menunjukkan data emisi karbon penting bagi perusahaan yang ingin bertindak secara bertanggung jawab, dan tata kelola perusahaan yang kuat menunjukkan bahwa mereka serius tentang hal ini (Rizky & Aini, 2023). Untuk meningkatkan kesadaran lingkungan perusahaan, terutama dalam hal berbagi informasi tentang emisi karbon, penting bagi dewan direksi, komite audit, dan dewan komisaris untuk menjadi bagian dari proses tata kelola perusahaan.

Dewan komisaris bertugas memberikan panduan dan mengawasi berbagai hal. Memiliki lebih banyak komisioner dapat membantu meningkatkan pengawasan proses pengungkapan, seperti yang ditunjukkan oleh (Trufvisa & Ardiyanto, 2019). Dewan direksi suatu organisasi sangat penting. Komunikasi dan kerja tim yang lebih baik biasanya berasal dari memiliki dewan yang lebih besar, menurut (Malik *et al.*, 2025). Perusahaan yang memiliki kelompok direksi yang kuat dan independen lebih cenderung jujur ketika membagikan hasil keuangan mereka kepada masyarakat, yang semakin peduli terhadap masalah lingkungan (Rizky & Aini, 2023). Untuk membuat manajemen berbagi informasi tentang emisi karbon, komite audit dapat mengawasi hal ini untuk memastikan mereka tidak bertindak dengan cara yang salah atau tidak jujur.

Meskipun dewan komisioner, direksi, dan komite audit sangat penting, penelitian sejauh ini menemukan hasil yang berbeda. Sebuah studi oleh Basar *et al.* (2024) menemukan bahwa dewan komisioner memengaruhi seberapa banyak informasi yang dibagikan perusahaan tentang emisi karbon mereka. Namun, menurut Ummah & Setiawan (2021), dewan komisaris tidak memiliki dampak pada deklarasi emisi karbon. Gunawan & Andhaniwati (2024) mengatakan bahwa emisi karbon dilaporkan karena para direktur, tetapi Amaliyah & Solikhah (2019) tidak menemukan bahwa direktur mempengaruhi emisi karbon. Berbeda dengan Angelina & Handoko (2023), Ramadhan & Riwayadi (2025) tidak menemukan bukti bahwa komite audit mempengaruhi bagaimana emisi karbon dilaporkan.

Sejauh pengamatan penulis, belum ada satu pun model yang menggabungkan dewan komisaris, direksi, dan komite audit dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, utang, profitabilitas, dan usia perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Mengingat hal tersebut, berikut adalah pertanyaan penelitian studi ini: 1) Apakah dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon? 2) Apakah dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon? 3) Apakah komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon? Karena belum banyak studi yang

berfokus pada pengungkapan emisi karbon suatu masalah yang saat ini signifikan di tingkat nasional dan global penelitian ini sangat penting.

Literatur penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara transparansi dan dewan komisaris, direksi, dan komite audit masih terus diteliti. Basar *et al.* (2024) melakukan penelitian tentang pengungkapan CSR dan dewan komisaris. Anita & Suryani (2021) meneliti hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan dewan direksi. Penelitian Agyei-Mensah (2019) berfokus pada komite audit dan pengungkapan sukarela. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki hubungan antara komite audit, direksi, dan dewan komisaris dengan pengungkapan emisi karbon.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stakeholder

Metode ini menyoroti bahwa bisnis tidak seharusnya dikelola hanya dengan berfokus pada satu kelompok tertentu, tetapi harus dilihat sebagai kemitraan para pemangku kepentingan yang berkolaborasi untuk menghasilkan manfaat bersama. Bisnis berfungsi sebagai platform untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, yang masing-masing memiliki kontribusi dan risiko yang berbeda terkait dengan kelangsungan perusahaan (Stoelhorst & Vishwanathan, 2024). Pandangan modern tentang teori pemangku kepentingan menggarisbawahi bahwa pencapaian suatu perusahaan kini dinilai tidak hanya berdasarkan hasil ekonomi, tetapi juga berdasarkan efektivitasnya dalam mengatasi konsekuensi sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitasnya.

Pengungkapan Emisi Karbon

Salah satu cara perusahaan dapat menurunkan atau menghilangkan emisi karbon adalah dengan melacak emisi tersebut. Berbagi informasi tentang emisi karbon merupakan bagian umum dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan. Berbagi informasi tentang emisi karbon dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan ditunjukkan dengan berbagi emisi karbonnya. Perusahaan harus berbagi informasi tentang aktivitas lingkungan mereka dan bagaimana aktivitas ini memengaruhi lingkungan dalam laporan ini (Yuniharto *et al.*, 2024).

Dewan Komisaris

Panel komisioner adalah badan korporasi yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh direksi, mengevaluasi kinerja organisasi, menawarkan panduan strategis, dan mempromosikan keterbukaan dan tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan.

Hal ini sesuai dengan teori pemangku kepentingan, yang menyatakan bahwa dalam perusahaan yang berkembang, para manajer memiliki tanggung jawab kepada lebih banyak orang daripada hanya pemegang saham. Mereka juga perlu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh kreditor, kelompok pemerintah, analis, masyarakat umum, dan lingkungan. Akibatnya, orang-orang yang terlibat berhak untuk melihat informasi tentang perusahaan. Situasi ini dapat menyebabkan sebagian orang memiliki lebih banyak informasi daripada yang lain. Oleh karena

itu, perusahaan akan berbagi lebih banyak informasi untuk mengurangi kesenjangan antara orang-orang di dalam perusahaan dan orang-orang di luar perusahaan.

Perusahaan dengan dewan komisioner yang lebih besar berada pada posisi untuk memberikan informasi yang lebih terbuka tentang operasi mereka. Contoh keterbukaan tersebut adalah pengungkapan emisi karbon (Trufvisa & Ardiyanto, 2019). Dari pembahasan sebelumnya, hipotesis penelitian dirumuskan:

H1 : "Dewan Komisaris membantu meningkatkan cara perusahaan berbagi informasi tentang emisi karbon mereka."

Direksi

Apa yang dipikirkan dan diputuskan oleh setiap direktur sangat penting. Semakin banyak direktur, semakin banyak ide dan pandangan yang dapat kita pertimbangkan saat mengambil keputusan. Ini memengaruhi pilihan tentang berbagi informasi tentang emisi karbon. Memiliki lebih banyak direktur memudahkan untuk berbagi dan memeriksa informasi yang baik tentang aktivitas perusahaan dengan orang-orang yang peduli dengan kesuksesannya. Akibatnya, perusahaan akan berbagi lebih banyak informasi tentang emisi karbonnya.

Teori pemangku kepentingan mengatakan bahwa dampak suatu organisasi melampaui hanya para pekerjanya sendiri, dan teori ini mendukung gagasan tersebut. Manajemen dapat lebih bertanggung jawab dengan dukungan dari kelompok eksternal. Berbagi data adalah salah satu contohnya, yang mencakup informasi terkait uang dan jenis informasi lainnya. Emisi karbon adalah salah satu cara perusahaan dapat berbagi informasi dengan pemangku kepentingannya yang bukan tentang uang.

Sebuah studi oleh Rizky & Aini (2023) menunjukkan bahwa perusahaan dengan dewan direksi yang tangguh dan independen umumnya lebih terbuka dalam melaporkan kinerja mereka kepada pemangku kepentingan. Dari pembahasan sebelumnya, hipotesis penelitian berikut muncul:

H2: "Dewan direksi membantu meningkatkan cara perusahaan berbagi informasi tentang emisi karbon mereka."

Komite Audit

Agyei-Mensah (2019) mengatakan bahwa komite audit membantu menghubungkan dewan direksi, manajer perusahaan, auditor internal dan eksternal, serta siapa pun yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Komite memilih auditor yang potensial dan mengawasi bagaimana audit internal dan eksternal berjalan, serta bagaimana pengendalian internal berfungsi.

Penyusunan laporan keberlanjutan, yang mencakup pengungkapan emisi karbon, secara intrinsik terkait dengan komite audit. Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham, komite audit diharuskan untuk mengawasi pelaporan keberlanjutan karena kelompok bisnis memiliki kewajiban mendasar untuk memberikan laporan keberlanjutan yang transparan (Arif *et al.*, 2021).

Selain itu, Angelina & Handoko (2023) melakukan penelitian yang menunjukkan peningkatan jumlah rapat komite audit merupakan indikator efektivitas dan efisiensi informasi lingkungan. Akibatnya, penulis dapat berspekulasi:

H3: "Komite audit membantu meningkatkan pelaporan emisi karbon."

METODE

Studi ini menggunakan angka dan data untuk menganalisis informasi. Kelompok perusahaan pertama yang diteliti terdiri dari perusahaan pertambangan yang mengajukan diri untuk bergabung dengan IDX antara tahun 2022 dan 2024, dengan asumsi mereka semua memberikan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan, kami melihat 177 sampel dari IDX dan situs web setiap perusahaan, dengan fokus pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan mereka. Studi ini menggunakan STATA untuk menganalisis data dari waktu ke waktu dengan model efek acak.

Fokus utama studi ini adalah bagaimana perusahaan melaporkan emisi karbon mereka, berdasarkan indeks GRI (GRI, 2016). Anda dapat mengukur seberapa baik perusahaan berbagi informasi tentang emisi karbon mereka dengan memeriksa seberapa dekat mereka mengikuti Standar GRI dan memberi peringkat berdasarkan hal tersebut. Item yang tidak memenuhi aturan mendapat skor 0, sedangkan item yang memenuhi aturan mendapat skor 1. Variabel independennya adalah: 1) ukuran dewan direksi, yang ditunjukkan oleh jumlah direktur (Purnomo *et al.*, 2021); 2) ukuran dewan direksi, yang ditunjukkan oleh jumlah komisaris (Malik *et al.*, 2025); dan 3) ukuran komite audit, yang ditunjukkan oleh jumlah anggota komite audit (Hartati, 2020). Ukuran perusahaan, utangnya, seberapa baik perusahaan menghasilkan uang, dan berapa lama perusahaan telah berdiri merupakan beberapa faktor penting yang memengaruhinya. Berikut adalah model regresi untuk studi ini: .

$$CED_{it} = \beta_0 + \beta_1 DK_{it} + \beta_2 Dir_{it} + \beta_3 KA_{it} + \beta_4 Size_{it} + \beta_5 Lev_{it} + \beta_6 Prof_{it} + \beta_7 Age_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

DK	= Dewan Komisaris
Dir	= Direksi
KA	= Komite Audit
Size	= Ukuran Perusahaan
Lev	= <i>Leverage</i>
Prof	= Profitabilitas
Age	= Usia Perusahaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pendapat dan keputusan setiap direktur sangat penting. Semakin banyak direktur, semakin banyak pandangan dan ide berbeda yang perlu dipertimbangkan saat mengambil keputusan. Hal ini memengaruhi keputusan tentang berbagi informasi mengenai emisi karbon. Memiliki lebih banyak direktur dalam suatu perusahaan dapat membantu mendorong dan memastikan bahwa informasi yang bermanfaat dan akurat tentang apa yang dilakukan perusahaan secara teratur dibagikan kepada para pemangku kepentingan. Hal ini akan membuat laporan perusahaan tentang emisi karbon menjadi lebih jelas.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std.dev	Min	Max
CED	177	2,621	2,871	0,000	7,000
DK	177	3,581	1,428	2,000	8,000
Dir	177	4,158	1,532	2,000	10,000
KA	177	3,282	0,706	2,000	6,000
Size	177	28,611	2,335	21,619	32,589
Lev	177	1,171	1,945	-4,942	11,325
Prof	177	7,293	13,311	-41,059	61,634
Age	177	31,966	13,924	5,000	59,000

Sumber : Hasil olah data stata 17

Hasil Uji Matrik Korelasi

Hasil matriks korelasi ditunjukkan pada Tabel 2. Hubungan antar variabel independen ditunjukkan memiliki nilai korelasi <0,90 pada tabel, yang mengindikasikan korelasi rendah dan dengan demikian mencegah masalah multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil Matrik Korelasi

Variabel	CED	DK	DIR	KA	SIZE	DER	ROA	AGE
CED	1.000							
DK	0,624	1.000						
Dir	0,515	0,585	1.000					
KA	0,321	0,303	0,226	1.000				
Size	0,328	0,141	0,231	0,146	1.000			
Lev	-0,018	0,044	-0,073	0,037	-0,002	1.000		
Prof	0,195	0,213	0,338	0,073	0,154	-0,235	1.000	
Age	0,245	0,332	0,188	0,309	0,002	0,062	-0,055	1.000

Sumber : Hasil olah data stata 17

Hasil Analisis Regresi

Studi ini menggunakan model efek acak karena lebih baik daripada model kuadrat terkecil biasa dan model efek tetap. Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bagaimana faktor independen memengaruhi faktor dependen. Kami setuju dengan H1 karena dewan komisaris memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pelaporan emisi karbon, dengan kemungkinan yang sangat rendah bahwa hasil ini disebabkan oleh kebetulan acak. Di sisi lain, H2 ditolak karena dewan direksi tidak terkait dengan bagaimana emisi karbon dilaporkan. Nilai signifikansi komite audit adalah 0,746 dan koefisiennya adalah -0,062. Ini menunjukkan bahwa komite audit tidak terkait dengan pengungkapan emisi karbon, sehingga kami juga menolak H3.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

CED	Coefficient	Std.Err	t	Sig.
DK	0,975	0,129	7,55	0,000***
Dir	0,385	0,120	0,32	0,748
KA	-0,062	0,193	-0,32	0,746
Size	0,296	0,109	2,70	0,007
Lev	-0,068	0,097	-0,71	0,480

Prof	0,000	0,011	-0,08	0,933
Age	0,016	0,019	0,86	0,388
-cons	-9,756	3,188	-3,06	0,002
Adj. R2	0,4780	0,4780	0,4780	0,4780
F-Statistics	93,750	93,750	93,750	93,750
Prob F-Statistics	0,000	0,000	0,000	0,000
N	177	177	177	177

Tingkat signifikansi: *10%, **5%, ***1%.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris memiliki skor 0,975, dan nilai signifikansi adalah 0,000. H1 diterima karena menunjukkan bahwa dewan komisaris memiliki dampak yang kuat dan penting dalam mengungkapkan emisi karbon pada tingkat 1%.

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi departemen ini berdasarkan hukum. Pratama (2021) mengatakan bahwa memiliki lebih banyak orang di dewan komisaris dapat membantu melacak emisi karbon dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Perusahaan dengan dewan komisaris yang lebih besar berbagi lebih banyak informasi tentang emisi karbon mereka (Trufvisa & Ardiyanto, 2019).

Dewan komisaris mengawasi prosedur manajemen, seperti aturan tentang keberlanjutan perusahaan dan upaya lingkungan. Memiliki dewan komisaris yang lebih besar dapat membantu mengawasi lebih dekat apa yang dilakukan perusahaan. Memiliki dewan yang lebih beragam membantu perusahaan merespons lebih baik terhadap apa yang diharapkan masyarakat terkait masalah lingkungan seperti berbagi informasi emisi karbon. Hal ini karena perpaduan berbagai pandangan, pengalaman, dan keterampilan bersatu. Jadi, memiliki dewan komisaris yang tepat seharusnya membantu orang memahami pentingnya berbagi informasi tentang emisi karbon.

Teori pemangku kepentingan mengatakan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab kepada lebih banyak orang daripada hanya pemiliknya. Pemangku kepentingan meliputi orang dan kelompok seperti pemberi pinjaman, organisasi pemerintah, komunitas lokal, dan lingkungan, di antara lainnya. Studi ini mengikuti metode ini. Jadi, dewan komisaris sangat penting dalam membantu semua orang memahami informasi dengan lebih baik dengan berbagi detail yang bukan hanya tentang uang, seperti fakta tentang emisi karbon. Trufvisa & Ardiyanto (2019) menemukan bahwa memiliki dewan komisaris membantu perusahaan berbagi lebih banyak informasi tentang emisi karbon mereka. Hasil kami sesuai dengan temuan mereka.

Pengaruh Direksi terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Hasil pengujian menunjukkan bahwa direktur memiliki nilai signifikansi 0,748 dan koefisien 0,385. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara direktur dan pelaporan emisi karbon, sehingga kita menolak H2.

Perusahaan tidak menjadikan operasi pengungkapan emisi karbon sebagai prioritas utama, dan baik kehadiran maupun karakteristik para direktur belum berhasil mendorong mereka untuk melakukannya lebih sering. Direksi tidak terlalu penting dalam mendorong pengungkapan emisi karbon karena direksi yang besar seringkali menghabiskan dana perusahaan untuk proyek-proyek selain proyek lingkungan, seringkali mengabaikan masalah pengungkapan emisi karbon secara sukarela (Nihayatuzzainia & Tumirin, 2025).

Ukuran direksi tidak selalu memengaruhi jumlah pengungkapan emisi karbon, seperti yang ditunjukkan oleh temuan ini. Kebijakan yang tidak secara langsung memengaruhi profitabilitas, seperti pengungkapan emisi karbon, seringkali diabaikan karena para direktur

pada dasarnya beroperasi di bawah tekanan langsung dari pemegang saham yang menuntut pencapaian tujuan keuangan jangka pendek. Selain itu, pelaksanaan aturan pengungkapan emisi karbon yang tidak efisien di tingkat perusahaan memperburuk situasi, yang mencegah manajemen untuk memprioritaskannya. Akibatnya, direksi yang besar tidak akan selalu mendorong peningkatan pengungkapan emisi karbon tanpa adanya tekanan eksternal yang signifikan dari regulator dan pemegang saham.

Untuk memahami hasil ini, kita dapat menggunakan teori pemangku kepentingan. Teori ini menyatakan bahwa bisnis harus fokus pada kepuasan semua pihak yang terlibat, bukan hanya pemegang saham, tetapi juga masyarakat dan lingkungan. Dewan direksi, yang menjalankan perusahaan, biasanya fokus pada menghasilkan uang bagi pemegang saham daripada mengkhawatirkan masalah lingkungan, yang penting bagi kelompok orang lain. Ini berarti bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak akan serta merta mendorong perusahaan untuk berbagi informasi tentang emisi karbon kecuali semua bagian perusahaan, termasuk dewan direksi, benar-benar berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan. Untuk memastikan data lingkungan jelas dan mudah diakses, memiliki dewan direksi yang kuat saja tidak cukup jika perusahaan tidak memasukkan praktik keberlanjutan dalam kebijakan utamanya. Nihayatuzzainia & Tumirin (2025) menemukan bahwa dewan direksi tidak terlalu memengaruhi bagaimana perusahaan melaporkan emisi karbon mereka, serupa dengan apa yang telah ditemukan sebelumnya.

Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Uji statistik pada komite audit menunjukkan nilai 0,746 dan hasil -0,062. Ini menunjukkan bahwa H3 salah dan komite audit tidak memengaruhi pelaporan emisi karbon.

Saat ini, tidak ada undang-undang yang memaksa bisnis untuk secara terbuka membagikan emisi karbon mereka. Jadi, memiliki komite audit tidak membuat perbedaan bagi perusahaan-perusahaan ini. Selain itu, komite audit tidak selalu memeriksa masalah lingkungan dengan sangat cermat. Di banyak perusahaan, tugas utama mereka biasanya hanya melihat laporan keuangan (Ramadhan & Riwayadi, 2025).

Hasil ini menunjukkan bahwa memiliki komite audit tidak berarti suatu bisnis akan membagikan jejak karbonnya. Ini masuk akal karena perusahaan pertambangan biasanya lebih fokus pada menghasilkan uang dan memenuhi target produksi. Akibatnya, hal-hal seperti pelaporan emisi karbon seringkali tidak mendapat cukup perhatian dari komite audit mereka. Selain itu, meskipun ada aturan tentang pelaporan emisi karbon, perusahaan seringkali tidak mengikutinya secara konsisten. Hal ini menyulitkan komite audit untuk memantau dan mendorong pelaporan lingkungan dengan benar. Akibatnya, komite audit tidak banyak membantu dalam meningkatkan pelaporan emisi karbon. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa bisnis memiliki kewajiban kepada masyarakat dan lingkungan, serta kepada kelompok lain. Hal ini membantu menjelaskan temuan penelitian ini. Laporan non-keuangan, seperti laporan tentang emisi karbon, memang penting, tetapi komite audit, yang membantu mengelola aturan internal perusahaan, biasanya lebih fokus pada memastikan keakuratan laporan keuangan. Komite audit mungkin tidak memasukkan isu lingkungan dalam pemeriksaan mereka, yang dapat menyebabkan kurangnya alasan bagi perusahaan untuk melaporkan emisi karbon mereka. Untuk memastikan semua pihak bertanggung jawab, penting untuk memberikan lebih banyak tugas kepada komite audit yang mencakup pengawasan terhadap praktik keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memengaruhi bagaimana perusahaan mengungkapkan emisi karbon mereka, yang merupakan kesimpulan yang sama dengan yang dicapai oleh Ramadhan & Riwayadi (2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Studi ini meneliti pelaporan emisi karbon dan hubungannya dengan manajemen dan pengendalian. Pada tahun 2030, Indonesia ingin mengurangi emisi karbonnya sebesar 29%. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu mengambil tindakan seperti berbagi informasi emisi karbon antar perusahaan. Perusahaan di Indonesia tidak banyak berbagi detail tentang emisi karbon mereka. Dari tahun 2022 hingga 2024, studi ini meneliti 177 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa memiliki dewan komisaris yang lebih besar dapat membantu mengelola berbagai hal dengan lebih baik, terutama dalam hal peraturan lingkungan. Hal ini akan menghasilkan pelaporan emisi karbon yang lebih jelas dan efektif. Para direktur biasanya fokus pada hasil keuangan yang cepat, dan tanpa aturan yang mewajibkan mereka untuk melaporkan emisi karbon, kepedulian terhadap lingkungan seringkali terabaikan. Komite audit terutama melihat kebenaran laporan keuangan, bukan laporan non-keuangan. Penggunaan aturan tentang pelaporan emisi karbon yang jarang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa isu lingkungan tidak dimasukkan dengan benar dalam pengawasan komite audit.

Saran

Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan teknik pengukuran yang berbeda untuk variabel pengungkapan emisi karbon, dan melakukan uji tambahan seperti robusnest test untuk melihat tingkat kokokohan hasil penelitian. Selain itu penting untuk menambahkan variabel kontrol kinerja lingkungan untuk mengetahui fokus perusahaan pada lingkungan. Perusahaan transportasi bisa digunakan sebagai sampel mengingat sumbangsih pada emisi karbon.

DAFTAR PUSTAKA

- Agyei-Mensah, B. K. (2019). The Effect Of Audit Committee Effectiveness And Audit Quality On Corporate Voluntary Disclosure Quality. *African Journal of Economic and Management Studies*, 10(1), 17–31. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-04-2018-0102>
- Amaliyah, I., & Solikhah, B. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 2(2), 129–141.
- Angelina, & Handoko, J. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Komite Audit , dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 49–68.
- Anita, & Suryani. (2021). Pengaruh Independensi Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Koneksi Politik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1769–1778.
- Arif, M., Sajjad, A., Farooq, S., Abrar, M., & Joyo, A. S. (2021). The impact of audit committee attributes on the quality and quantity of environmental , social and governance (ESG) disclosures. *Corporate Governance*, 21(3), 497–514. <https://doi.org/10.1108/CG-06-2020-0243>
- Basar, N. F., Sari, A., & Muliana, S. (2024). Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di EI Tahun 2022-2023. *Bongaya Journal of Research in Accounting*, 7(2), 47–60.
- GRI. (2016). GRI 103: Management Approach 2016. *Universal Standards 100 Series*, 1–13. <https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download->

- center/%0Awww.globalreporting.org
- Gunawan, M. S. N., & Andhaniwati, E. (2024). Kontribusi Green Investment dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Al-Buhuts*, 20(2), 123–136.
- Hartati, N. (2020). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris , Komite Audit , dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 01(02), 175–184.
- Investor.id. (2024). *Merdeka Copper (MDKA) Takes Action to Reduce Carbon Emissions*. Mining Directory. <https://www.indonesiaminer.com/company/detail-news/2024-07-31105523-merdeka-copper-mdka-takes-action-to-reduce-carbon-emissions>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Akselerasi Net Zero Emissions, Indonesia Deklarasikan Target Terbaru Penurunan Emisi Karbon*. Ekon.Go.Id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4652/akselerasi-net-zero-emissions-indonesia-deklarasikan-target-terbaru-penurunan-emisi-karbon>
- Malik, A. Bin, Junus, O., Masiaga, N., & Karundeng, D. R. (2025). Pengaruh Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Kinerja Keberlanjutan Melalui Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan & Minuman Di Bei Tahun 2019- 2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 274–301.
- Nihayatuzzainia, & Tumirin. (2025). Pengaruh Kinerja Lingkungan , Kepemilikan Institusional , dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Carbon Emission Disclosure. *Jurnal Akuntan Publik*, 3(1), 26–41.
- Pratama, Y. M. (2021). Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia. *Modus*, 33(2), 120–137. <https://doi.org/10.24002/modus.v33i2.4644>
- Purnomo, D. A., Mudjiyanti, R., Hariyanto, E., & Pratama, B. C. (2021). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. *Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2), 82–91.
- Ramadhan, O. R., & Riwayadi, R. (2025). Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 6(1), 29–55.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun, (1994). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Ffid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Rizky, I., & Aini, E. N. (2023). Tata Kelola dan Strategi Hijau dalam Optimalisasi Kualitas Pengungkapan Emisi Karbon. *Behavioral Accounting Journal*, 6(2), 94–105.
- Safa'at, R. B., & Arsjah, R. J. (2025). Pengaruh Komite Audit , Kinerja Lingkungan , dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon: Studi Pada Perusahaan Pertambangan Bei 2019 – 2023 Dengan Pendekatan Data Panel. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(2), 2203–2221. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1595>
- Salsabila, K., & Murdianingrum, S. L. (2026). Tax Avoidance: Pengaruh Komisaris Independen, Capital Intensity, dan ESG Disclosure pada Sektor Energi. *Journal of Accounting Research*, 15(1), 158–172.
- Stoelhorst, J. W., & Vishwanathan, P. (2024). Beyond Primacy: A Stakeholder Theory of Corporate Governance. *AcademyofManagement Review*, 49(1), 107–134. <https://doi.org/10.5465/amr.2020.0268>
- Syafik, M., Setiawan, D., Hartoko, S., & Aryani, Y. A. (2025). The Role of Media Exposure on Board Capital and Carbon Emission Disclosure. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01014-1>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun, (2009).
- Trufvisa, U. S., & Ardiyanto, M. D. (2019). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.

- Ummah, Y. R., & Setiawan, D. (2021). Do Board of Commisioners Characteristic and International Environmental Certification Affect Carbon Disclosure? Evidence from Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 215–228. <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.21332>
- Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun, (2004).
- Yuniharto, J. D. A., Utami, R. H., Fayliencent, I. N., & Hatta, A. J. (2024). Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Sektor Industri: Sudut Pandang Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 8(01), 130–139.